

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PELAYANAN FISKUS, PENERAPAN *E-BILLING*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.**

**(STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA KOTA TEGAL)**

# SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

**Oleh:**

**Sya’baeni Azzahroh**

**NPM : 4320600149**

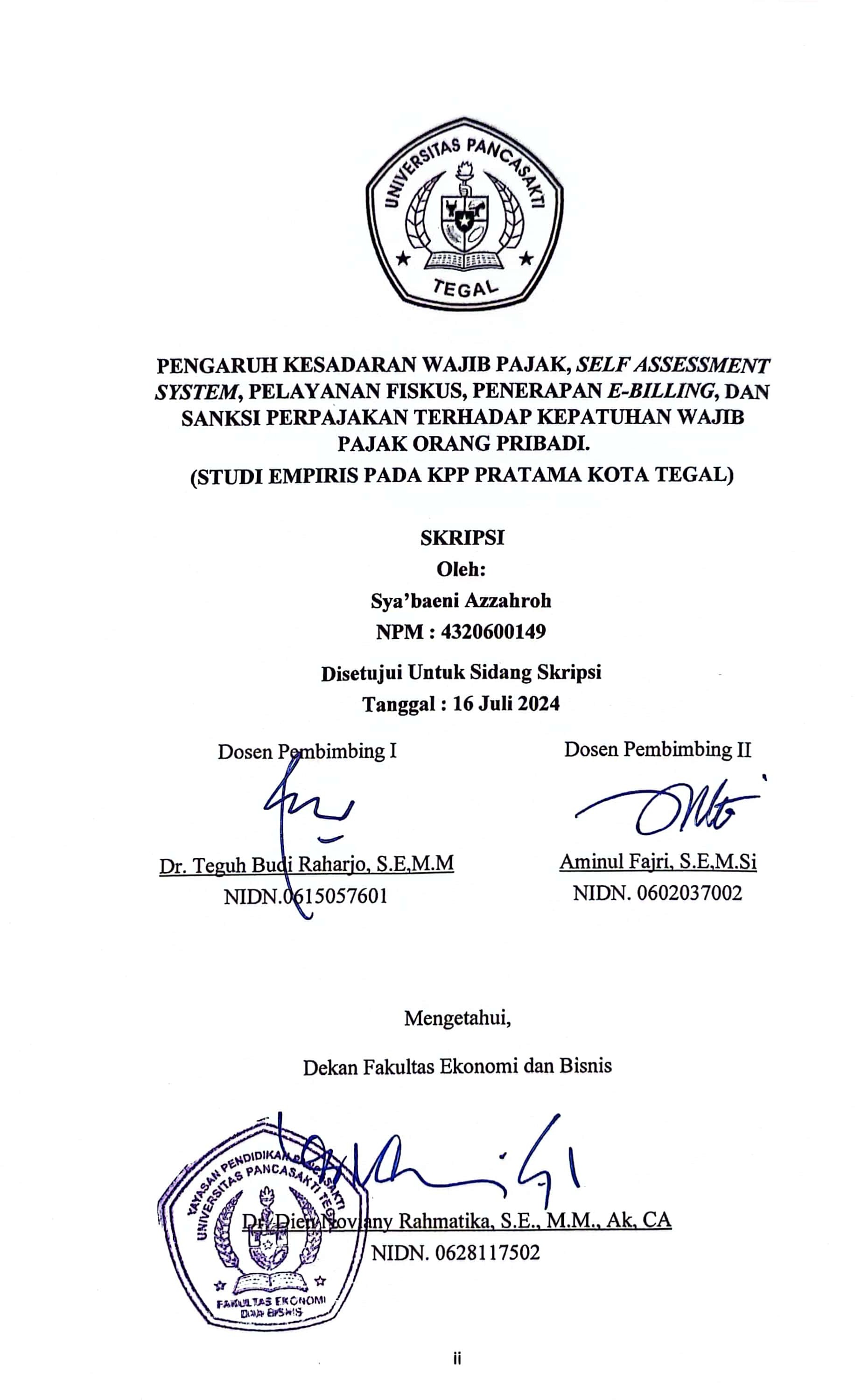
Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

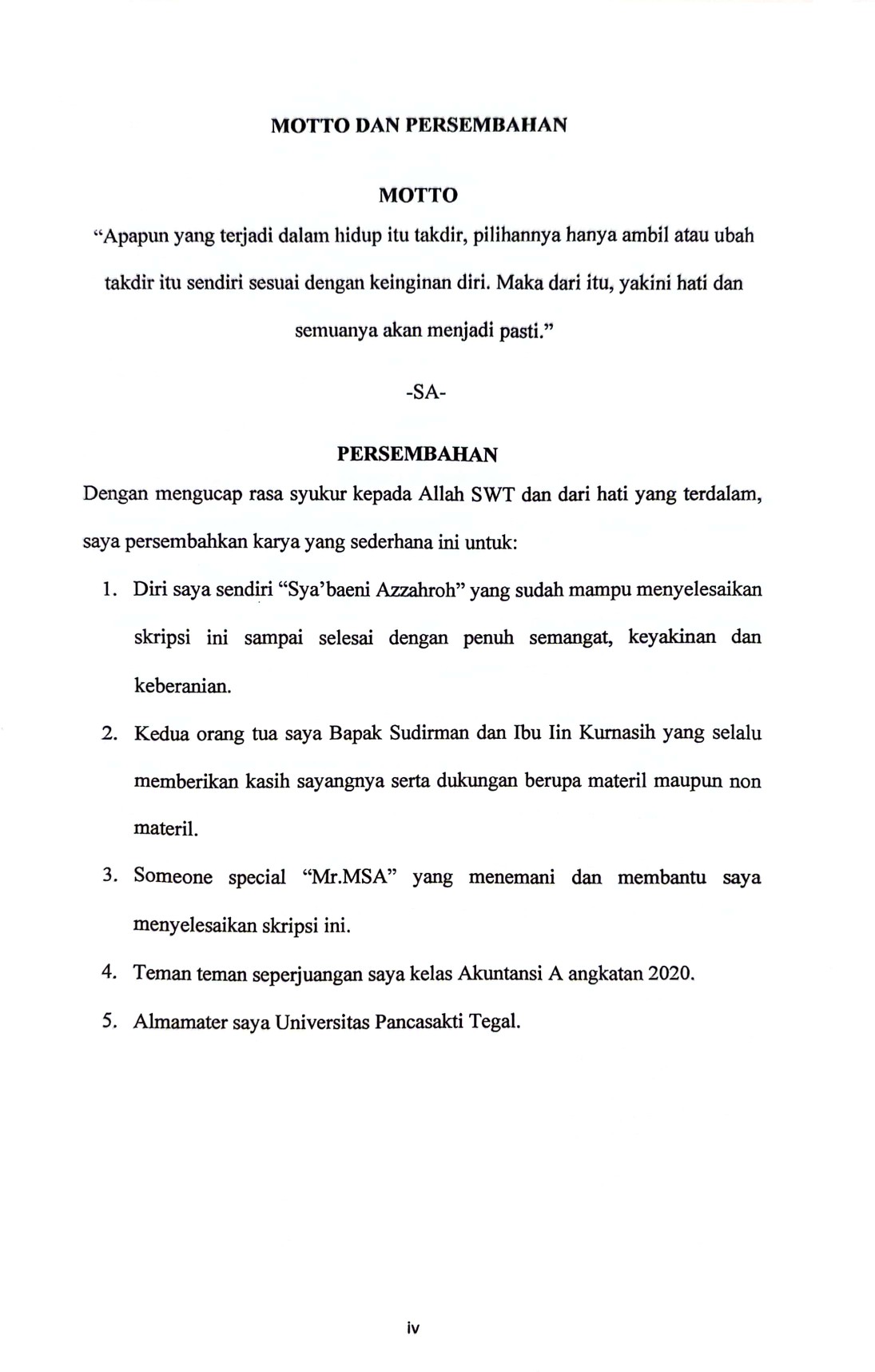
**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**

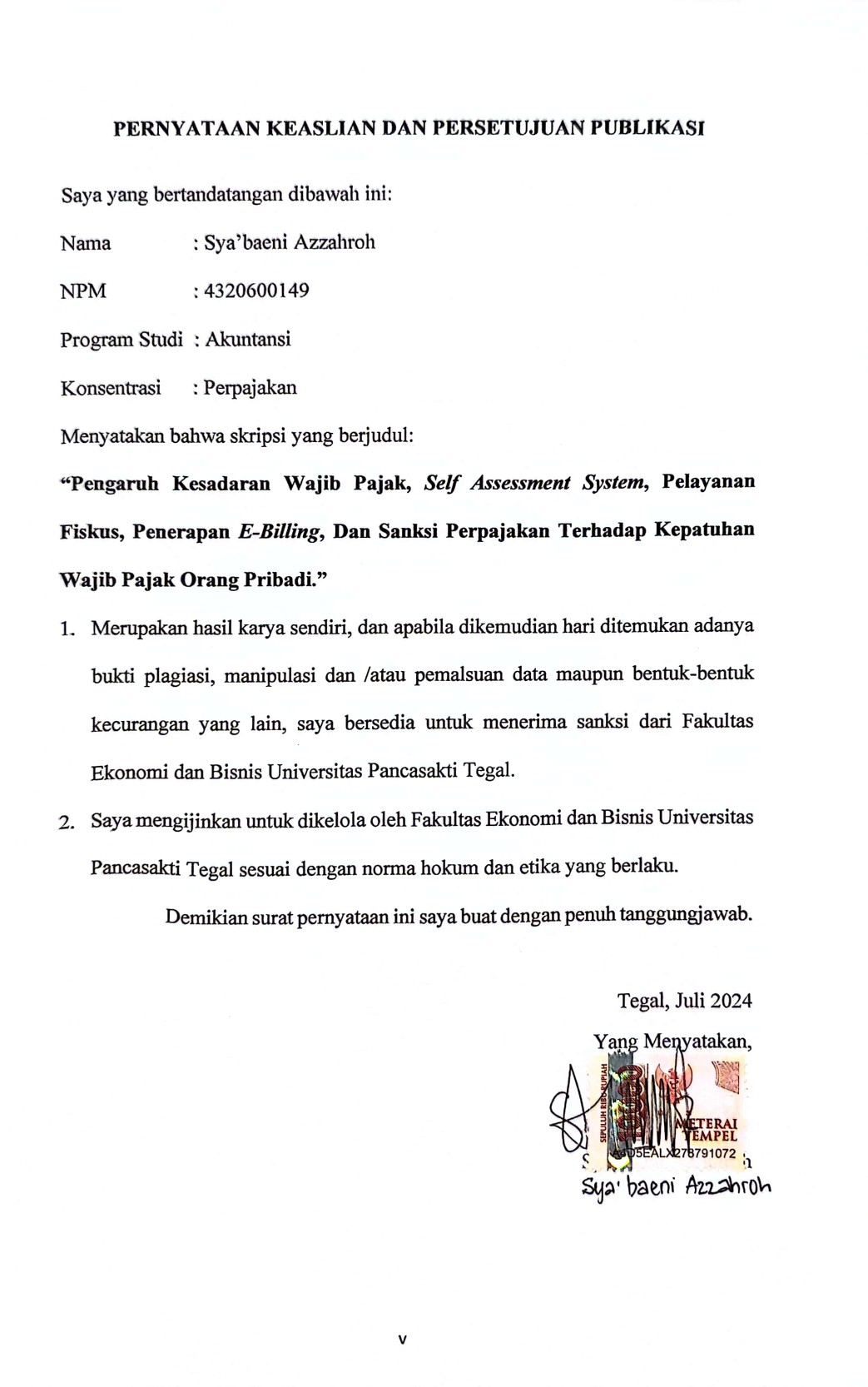
**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**









# ABSTRAK

Sya'baeni Azzahroh, 2024, *The Effect of Taxpayer Awareness, Self-Assessment System, Fiscal Services, Implementation of E-billing, Implementation of Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Tegal City.*

*Indonesia is one of the developing countries that continues to carry out development in various sectors. The rampant development of existing infrastructure and the construction of a new capital city that is underway, it also affects the expenditure of national income. There are various sources of national income, one of which is the taxation sector which is the largest source of state cash revenue.*

*This research uses a quantitative approach. The type of data used in this study is primary data. The sample in this study amounted to 100 respondents with certain criteria using non-probability sampling method with purposive sampling technique. The data source in this study is primary data obtained directly from filling out questionnaires given to respondents. The data collection technique uses a questionnaire or questionnaire method. The data analysis technique used Multiple Linear Regression Analysis and significant tests (classical assumption test, t test, f test, and determination coefficient test).*

*Based on the results of this study are 1) From partial testing of Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance obtained sig value = 0.000> 0.05, 2) From partial testing of the Self-Assessment System on Taxpayer Compliance, the sig value = 0.000 < 0.05, 3) From partial testing of Tax Service on Taxpayer Compliance, the sig value = 0.031 < 0.05, 4) From partial testing of E-Billing Implementation on Taxpayer Compliance, the sig value = 0.001 < 0.05, 5) From partial testing of tax sanctions on Taxpayer Compliance, the sig value = 0.030 < 0.05.*

*The conclusion of this research is 1) Taxpayer awareness affects the compliance of individual taxpayers in Tegal City, 2) Self Assessment System affects the compliance of individual taxpayers in Tegal City, 3) Fiskus service affects the compliance of individual taxpayers in Tegal city, 4) The application of E-Billing affects the compliance of individual taxpayers in Tegal City, 5) Tax Sanctions affects the compliance of individual taxpayers in Tegal City.*

***Keywords: Taxpayer Awareness, Self Assessment Sytem, Fiscal Services, E-Billing Implementation, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.***

**ABSTRAK**

**Sya’baeni Azzahroh, 2024, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessement System*, Pelayanan Fiskus, Penerapan *E-billing*, Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Tegal.**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan pada berbagai sektor. Maraknya pembangunan infrastruktur yang ada sekarang dan pembangunan ibu kota baru yang sedang berjalan, itu juga berpengaruh terhadap pengeluaran pendapatan nasional. Sumber pendapatan nasional ada dari berbagai macam, salah satunya yaitu sektor perpajakan yang merupakan sumber terbesar dalam penerimaan kas negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden dengan kriteria tertentu dengan menggunakan metode *non*-*probability* sampling dengan teknik *purposive* sampling. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner. Metode analisis data menggunakan Teknik analisis data yang digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji signifikan (Uji Asumsi klasik, Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi).

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) Dari pengujian secara parsial Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai sig = 0,000 > 0,05, 2) Dari pengujian secara parsial *Self Assessement System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05, 3) Dari pengujian secara parsial PelayananFiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai sig = 0,031 < 0,05, 4) Dari pengujian secara parsial Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai sig = 0,001 < 0,05, 5) Dari pengujian secara parsial sanksi perpajakan terhadap Kepatuan Wajib Pajak diperoleh nilai sig = 0,030 < 0,05.

Kesimpulan dari penelitia ini adalah 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tegal, 2) *Self Assessement System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tegal, 3) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tegal, 4) Penerapan *E-Billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tegal, 5) Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tegal.

**Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessement Sytem*, Pelayanan Fiskus, Penerapan *E-Billing*, Sanksi Perpajakan, Kapatuhan Wajib Pajak.**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia – Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessement System*, Pelayanan Fiskus, Penerapan *E-Billing*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”*.**

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdullah Mubarok, S.E, M.M, Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E,M.M selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Aminul Fajri, S.E,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mencurahkan dan mengamalkan ilmunya kepada peneliti.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

|  |
| --- |
| Tegal, 16 Juli 2024 |
| Sya’baeni Azzahroh |
|  |

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc172875093)

[HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI](#_Toc172875094) ii

[HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI](#_Toc172875095) iii

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN](#_Toc172875096) iv

[HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI](#_Toc172875097) v

[ABSTRAK vi](#_Toc172875098)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc172875099)

[DAFTAR ISI x](#_Toc172875100)

[DAFTAR TABEL xiv](#_Toc172875101)

[DAFTAR GAMBAR xv](#_Toc172875102)

[BAB I 1](#_Toc172875103)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc172875104)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc172875105)

[B. Rumusan Masalah 9](#_Toc172875106)

[C. Tujuan Penelitian 10](#_Toc172875107)

[D. Manfaat Penelitian 10](#_Toc172875108)

[a. Manfaat Teoritis 10](#_Toc172875109)

[b. Manfaat Praktis 11](#_Toc172875110)

[BAB II 12](#_Toc172875111)

[TINJAUAN PUSTAKA 12](#_Toc172875112)

[A. Landasan Teori 12](#_Toc172875113)

[*1.* *Teory Agency* 12](#_Toc172875114)

[2. Pajak 14](#_Toc172875115)

[3. Kesadaran Wajib Pajak 16](#_Toc172875116)

[*4.* *Self Assessment System* 17](#_Toc172875117)

[5. Pelayanan Fiskus 17](#_Toc172875118)

[6. Penerapan *E-Billing* 18](#_Toc172875119)

[7. Sanksi Perpajakan 18](#_Toc172875120)

[B. Penelitian Terdahulu 19](#_Toc172875121)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 28](#_Toc172875122)

[D. Hipotesis 32](#_Toc172875123)

[BAB III 34](#_Toc172875124)

[METODE PENELITIAN 34](#_Toc172875125)

[A. Jenis Penelitian 34](#_Toc172875126)

[B. Populasi dan Sampel 34](#_Toc172875127)

[1. Populasi 34](#_Toc172875128)

[2. Sampel 35](#_Toc172875129)

[C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 36](#_Toc172875130)

[1. Definisi Konseptual Variabel 36](#_Toc172875131)

[2. Operasional Variabel 37](#_Toc172875132)

[D. Metode Pengumpulan Data 39](#_Toc172875133)

[E. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian 40](#_Toc172875134)

[1. Uji Validitas 40](#_Toc172875135)

[2. Uji Reliabilitas 40](#_Toc172875136)

[F. Metode Analisis Data 41](#_Toc172875137)

[1. Statistik Deskriptif 41](#_Toc172875138)

[2. Uji Asumsi Klasik 41](#_Toc172875139)

[3. Analisis Regresi Linear Berganda 44](#_Toc172875140)

[4. Pengujian Hipotesis 45](#_Toc172875141)

[5. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R2) 46](#_Toc172875142)

[BAB IV 47](#_Toc172875143)

[PEMBAHASAN 47](#_Toc172875144)

[A. Gambaran Umum Objek Penelitian 47](#_Toc172875145)

[1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal 47](#_Toc172875146)

[2. Kedudukan dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal 4](#_Toc172875147)9

[3. Tugas dan Fungsi Tiap Seksi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal 50](#_Toc172875148)

[B. Hasil Penelitian 51](#_Toc172875149)

[1. Pengujian Instrumen Penelitian 51](#_Toc172875150)

[2. Deskripsi Responden 54](#_Toc172875151)

[3. Analisis Data 56](#_Toc172875152)

[C. Pembahasan 69](#_Toc172875153)

[BAB V 77](#_Toc172875154)

[KESIMPULAN DAN SARAN 77](#_Toc172875155)

[A. Kesimpulan 77](#_Toc172875156)

[B. Saran 77](#_Toc172875157)

[DAFTAR PUSTAKA 80](#_Toc172875158)

[LAMPIRAN 81](#_Toc172875159)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Fenomena Wajib Pajak Orang Pribadi 7](#_Toc171316866)

[Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22](#_Toc171316867)

[Tabel 3.1 Operasional Variabel 37](#_Toc171316868)

[Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas 52](#_Toc172875542)

[Tabel 4. 2 Hasil Uji Realibitas 54](#_Toc172875543)

[Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 55](#_Toc172875544)

[Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usia 55](#_Toc172875545)

[Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 56](#_Toc172875546)

[Tabel 4. 6 Hasil Descriptive Statistics 5](#_Toc172875547)7

[Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas 59](#_Toc172875548)

[Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas 59](#_Toc172875549)

[Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 61](#_Toc172875550)

[Tabel 4. 10 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 63](#_Toc172875551)

[Tabel 4. 11 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 65](#_Toc172875552)

[Tabel 4. 12 Uji Analisis Koefisien Determinasi 66](#_Toc172875553)

[Tabel 4. 13 Uji Beda Berdasarkan Jenis Kelamin 67](#_Toc172875554)

[Tabel 4. 14 Uji Beda Berdasarkan Usia 67](#_Toc172875555)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran Konseptual 32](#_Toc171317059)

[Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 60](#_Toc171317004)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat sampai saat ini, mendorong manusia agar lebih menguasai, menerima, dan menyesuaikan adanya perubahan tersebut. Di dalam negara berkembang seperti Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi, pemerintah indonesia harus mampu mengelola pendapatan nasional dengan baik. Maraknya pembangunan infrastruktur yang ada sekarang dan pembangunan ibu kota baru yang sedang berjalan, itu juga berperan dalam pengeluaran pendapatan nasional.

Sumber pendapatan nasional ada dari berbagai macam, salah satunya yaitu sektor perpajakan yang merupakan sumber terbesar dalam penerimaan kas negara. Sektor perpajakan sangat berperan penting bagi negara dengan besarnya jumlah yang disumbangkan dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Pajak yang berasal dari iuran rakyat pada negara didasari pada peraturan Undang-undang No.16 Tahun 2009 dan itu bersifat memaksa. Tetapi dengan begitu rakyat yang sudah membayar pajak tidak bisa merasakan hasilnya secara langsung, melainkan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Karena sebagian besar pembangunan nasional juga dibuat dengan maksud kesejahteraan rakyat. Sumber dana yang mencukupi, membuat pendapatan nasional dapat melancarkan pembangunan yang sedang berlangsung atau yang sedang direncanakan. Rakyat yang membayar pajak di artikan sebagai harus pajak (WP), yang harus sadar akan keharusan dan dituntut dengan maksud bisa menghitung pajak, mengerti tentang undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, memaksimalkan kejujuran dengan maksud mematuhinya, lalu memahami arti keharusan membayar pajak (Purnamasari & Wibowo, 2021).

Harus pajak menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri atas pajak terutang nya kepada negara. Harus pajak dapat melakukan penyetoran pajak melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi lainnya. Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (Sumber DJP). Dalam hal ini harus pajak yang dituju diantaranya, harus pajak individu personal yang mempunyai penghasilan dan telah mempunyai nomor pokok harus pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tidak semua harus pajak mau dan paham dengan maksud menyetorkan keharusan pajaknya, tapi sudah banyak juga yang patuh dan sadar akan tanggung jawab membayar pajak. Keikutsertaan harus pajak seringkali menurun dan tidak sedikit yang lalai akan keharusannya, dengan alasan hasil dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan timbal baliknya secara langsung. Banyak pertimbangan dengan maksud harus pajak tidak mematuhi keharusannya, diantaranya faktor internal yang datang dari kesadaran yang dimiliki harus pajak tersebut (Joy *et al*., 2022).

Faktor eksternal juga memperani harus pajak dengan maksud tidak mematuhi keharusan membayar pajaknya. Keikutsertaan harus pajak yaitu perilaku harus pajak dimotivasi dari pemahamannya tentang keharusan perpajakan merujuk pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan Setiadi & Rosyadi (2022). Pemahaman tentang harus pajak ini merupakan unsur pertama yang berdampak dalam keikutsertaan harus pajak. Perpajakan adalah masalah pajak, tetapi kesadaran adalah kondisi pemahaman atau pengertian. Demi terpenuhinya sasaran pajak yang diperlukan negara, patut adanya peningkatan keikutsertaan harus pajak dengan maksud menjalankan keharusan perpajakannya. Perdebatan mengenai perpajakan misalnya banyak masyarakat yang masih tidak ingin membayar pajak, sedangkan membayar pajak di zaman sekarang amat mudah sekali karena dapat menggunakan handphone secara online yang bisa dilakukan dimanapun (Varotsis & Katerelos, 2020).

Upaya dengan maksud mengukur keberhasilan penerimaan pajak mempunyai berbagai sasaran administrasi perpajakan contohnya, meningkatkan keikutsertaan harus pajak dengan maksud membayar pajak dan melaksanakan ketetapan perpajakan dengan maksud mendapatkan penerimaan sebanyak mungkin dengan anggaran yang optimal. Keikutsertaan harus pajak bisa diskor dari harus pajak tersebut melaporkan diri, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), dan dalam membayar pajaknya (Atmaja & Sumarta, 2023). Kesadaran pajak adalah pengetahuan atau pemahaman tentang sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Masyarakat akan patuh dalam keharusannya dengan maksud membayar pajak jika masyarakat pembayar pajak memandang baik kinerja pemerintah dalam kegiatan negara Purnamasari & Wibowo (2021). Kemampuan dengan maksud membantu harus pajak mematuhi undang-undang perpajakan itu sangat penting, karena mereka percaya bahwa membayar pajak tidak mendapatkan timbal balik yang relevan, banyak harus pajak yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak terutangnya dengan benar dan tepat waktu.

Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, dan kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Konsep Sistem Peskoran Mandiri diperkenalkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang memungkinkan harus pajak dengan maksud menentukan, membayar, dan mencatat sendiri jumlah pajaknya. Sejak Sistem Peskoran Mandiri diterapkan, harus pajak tidak hanya mengandalkan kesadaran dan integritasnya, tetapi juga harus mempunyai pemahaman teknis yang memadai tentang pajak dengan maksud memastikan bahwa keharusan perpajakannya dipenuhi dengan benar dan efisien Apriani *et al*., (2018). Kemampuan negara dalam peningkatan pajak dengan menuntaskan keharusan para harus pajak yang mana, dari pihak perpajakan sendiri harus berusaha memberi efek dan pandangan baik kepada peran pajak di negara Indonesia. Adanya efek dan pandangan baik bagi masyarakat, dipastikan akan ada timbal balik dengan atau tanpa sengaja. Hal tersebut menjadi sebab atas upaya awal mengenai tujuan memperbaiki kesan baik pajak pada masyarakat dengan memberi berbagai pemahaman juga pengetahuan tentang perpajakan (Istimemonda *et al*., 2023).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya dengan maksud memaksimalkan penerimaan pajak, yaitu melakukan reformasi sistem perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System* Gusti & Muid (2023). Pengimplementasian *Self Assessment System* memberikan kewenangan kepada harus pajak agar bisa menghitung besarnya pajak dengan mandiri. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan sudah mengatur seluruh tanggung jawab harus pajak, bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika harus pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai harus pajak (Nilla & Widyawati, 2021).

Selain modernisasi administrasi perpajakan sebagai faktor keikutsertaan harus pajak, dengan maksud meningkatkan penerimaan kas negara pelayanan fiskus perpajakan juga faktor keikutsertaan harus pajak, dimana pelayanan aparatur pajak kepada harus pajak yang langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus selalu ditingkatkan. Pelayan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membatu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan harus pajak, serta tidak lepas dari sanksi pajak yang berlaku bagi harus pajak yang sejalan dengan peraturan yang di terapkan oleh fiskus pajak yang berpegang pada Undang-Undang perpajakan (Yuliani & Fidiana, 2021).

Sebelum adanya reformasi perpajakan kegiatan perpajakan dilakukan secara manual mulai dari pengisian, pelaporan, dan pembayaran dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak. Namun saat ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi dalam pelayanan pajak, dengan melakukan administrasi modern perpajakan di setiap pelaksanaan pelayanan perpajakan, yang bisa memberi akses berupa kemudahan bagi harus pajak dalam melaksanakan keharusan perpajakannya. Perubahan sistem administrasi perpajakan disebabkan oleh perkembangan teknologi yang kian lama semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan diperbaikinya sistem pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan mengubah pelayanannya dari offline menjadi online dengan menggunakan sistem *e-billing*. Diharapkan adanya sistem ini dapat membantu jalannya proses pembayaran pajak di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi harus pajak dengan maksud tidak membayar keharusan pajaknya (Nilla & Widyawati, 2021).

Penelitian Nugrahani & Suryaningrum (2023) menemukan bahwa kedisiplinan harus pajak dalam membayar pajak penghasilan mangalami peningkatan secara relevan, dengan meningkatkan pengetahuan harus pajak. Menurut penelitian Nilla & Widyawati (2021), diperani secara negatif siginfikan dalam pengetahuan harus pajak dengan maksud melunasi pajak penghasilan. Sanksi atau hukuman pajak merupakan komponen kedua, selain meningkatkan kesadaran harus pajak, pembayaran ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang sangat penting. Faktor lain yang memperani kemampuan harus pajak saat melakukan disiplinnya, yaitu sanksi atau hukuman perpajakan yang dapat ditujukan kepada harus pajak. Menurut penelitian Nugrahani & Suryaningrum (2023), sanksi atau hukuman pajak secara baik relevan meningkatkan kedisiplinan harus pajak. Atmaja & Sumarta (2023) memberikan pembuktian bahwa variabel sanksi atau hukuman perpajakan tidak berperan dalam kedisiplinan harus pajak. Pemerintah dapat meningkatkan permintaan pajak sambil juga mempromosikan feedback baik yang akan diterima oleh harus pajak. Faktor utama yang harus dimiliki harus pajak yaitu kesadaran harus pajak unruk membayar pajak terutangnya. Pengimplementasian sanksi pajak juga merupakan salah satu cara dengan maksud memberikan pelajaran kepada pelanggar pajak.

**Tabel 1.1**

**Fenomena Harus Pajak Individu Personal**

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Kasus |
| 1. | Jumlah pelaporan SPT pajak individu personal telah mencapai 9,6 juta harus pajak, atau naik 7,7 persen dari tahun sebelumnya. Naiknya secara kuantitatif 686.980 SPT. Tahun lalu itu posisi tadi malam adalah 8.914.061 SPT yang sudah masuk,” ungkapnya. |
| 2. | Dari 14,18 juta tersebut, jumlah penerimaan atas pelaporan SPT Tahunan individu personal 2024 mencapai **13.141.719** atau menyumbang 92,63% dari total keseluruhan penerimaan SPT Tahunan 2024. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, penerimaan SPT Tahunan individu personal di tahun 2024 mengalami **peningkatan sebanyak 6,88%.** |

Sumber: setkab.go.id, pajakku.com

Fenomena yang ada menunjukan bahwa keikutsertaan harus pajak individu personal mengalami peningkatan dalam pelaporan. Namun demikian, rasio keikutsertaan formal harus pajak dalam pelaporan SPT Tahunan 2024 yang ditargetkan oleh DJP belum tercapai. Pada tahun 2024, DJP mencatat ada sebanyak 19.273.374 yang harus melaporkan SPT Tahunan. DJP sendiri menetapkan target keikutsertaan formal tahun 2024 sebanyak 83,22%. Sedangkan, **tingkat keikutsertaan formal hingga 30 April 2024 baru mencapai 73,58%** dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan sebanyak 14.186.630. Di angka sekarang, jumlah penerimaan SPT Tahunan di tahun 2024 harus melebihi 16.039.302 pelaporan atau sekitar lebih dari 1.852.672 (9,64%) lagi dengan maksud mencapai target rasio keikutsertaan formal yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan dengan maksud menganalisis peran kesadaran harus pajak, *self assessement system*, pelayanan fiskus, pengimplementasian *e-billing*, dan sanksi perpajakan dalam keikutsertaan membayar pajak harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal. Kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu usaha meningkatkan keikutsertaan pelaporan perpajakan individu personal maupun badan dengan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang memperani keikutsertaan dengan maksud pelaporan perpajakan. Pada beberapa tahun terakhir persentase tingkat keikutsertaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal yang tidak stabil , berbanding terbalik dengan jumlah harus pajak yang terdaftar menunjukan adanya penurunan dalam keikutsertaan harus pajak sehingga peneliti tertarik dengan maksud meneliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal.

Merujuk pada pemaparan dasar tersebut, peneliti tertarik dengan maksud melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, *Self Assessement System*, Pelayanan Pajak, Penerapan *E-Billing*, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”.**

## Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak di kota tegal berpengaruh terhadap kpatuhan wajib pajak orang individu yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KKP Pratama Kota Tegal?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang individu yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal?
4. Apakah penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang individu yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal?
5. Apakah sanksi pajak nerpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang individu yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal?

## Tujuan Penelitian

1. Dengan maksud mengetahui peran kesadaran harus pajak di kota tegal berperan dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal.
2. Dengan maksud mengetahui peran *self assessment system* dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KKP Pratama Kota Tegal.
3. Dengan maksud mengetahui peran pelayanan fiskus dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal.
4. Dengan maksud mengetahui peran pengimplementasian *e-billing* dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal.
5. Dengan maksud mengetahui peran sanksi pajak dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal.

## Manfaat Penelitian

### Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diekspektasikan bisa memberikan sumbangan pemikiran dengan maksud pengembangan ilmu akuntansi perpajakan yang di implementasikan penulis dari capaian nya selama materi perkuliahan dan menggambarkan teori apa saja yang digunakan dan keterkaitannya dengan variabel independen serta mampu mengetahui faktor-faktor yang memperani keikutsertaan WPOP.

### Manfaat Praktis

1. Bagi KPP Pratama Tegal

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan bahan masukan dengan maksud hal-hal yang berhubungan dengan keikutsertaan harus pajak individu personal.

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi informasi dasar dengan maksud rujukan lebih lanjut dengan teori yang didapat di dalam perkuliahan ataupun kenyataan yang terjadi di lapangan dan dapat dikembangkan lebih luas.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori
2. *Teory Agency*

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan menggambarkan konsep suatu hubungan yang berisi kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada agen dengan maksud melakukan jasa atau tindakan tertentu serta mengambil keputusan dalam situasi yang diharuskan oleh kontrak. Konflik dapat muncul diantara prinsipal dan agen karena adanya perbedaan kepentingan. Prinsipal dan manajemen bisa menjadi agen yang masing-masing mencoba dengan maksud memaksimalkan utilitasnya. Selain itu, prinsipal dapat membatasi konflik dengan memberikan insentif yang tepat bagi agen, serta melakukan monitoring dengan maksud meminimalkan tindakan agen disamping jalur yang telah ditentukan. Hal ini yang dikenal biaya keagenan (*agency cost*) atau biaya yang terjadi karena adanya konflik antara prinsipal dan agen. Biaya ini berupa biaya informasi, kontrol dan disiplin yang ditimbulkan oleh prinsipal dengan maksud memastikan bahwa agen bertindak dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Teori *agency* mengasumsikan bahwa semua individu berusaha dengan maksud mencapai kepentingan terbaik mereka sendiri, tidak hanya dari kompensasi keuangan tapi juga dari fasilitas lainnya yang tersedia melalui suatu hubungan agensi, seperti waktu luang yang luas, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan dan jam kerja yang fleksibel. Principal (pemegang saham) di sisi lain hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di suatu perusahaan. Agen mempunyai sejumlah besar kekayaan, termasuk kekayaan keuangan dan modal manusia. Modal manusia adalah skor yang dimiliki oleh para menajer yang dievaluasi oleh pasar dan diperani oleh kinerja perusahaan. Karena rendahnya utilitas dalam kekayaan dan besarnya jumlah modal agen yang terikat pada perusahaan, agen diamsusikan akan cenderung menghindar resiko (*risk avarse*). Di sisi lain, principal terdorong dengan maksud meningkatkan kinerja dengan meningkatnya profitabilitas, sementara agen didorong dengan maksud memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya.

Teori keagenan menyebabkan konflik yang timbul antara fiskus (pemungutan pajak) dan manajemen perusahaan (pembayaran pajak). Fiskus berharap mendapatkan pendapatan yang sebanyak-besarnya dari pajak, sementara manjeen ingin membuat laba dengan biaya pajak yang rendah. Prinsipal dapat memberi mandat pada agen dengan maksud meminimalkan pajak perusahaan, dimana jika agen tidak mematuhi maka akan menanggung biaya. Hal ini akan menyebabkan prinsipal mendapatkan manfaat dalam bentuk pajak yang lebih rendah. Namun, karena adanya tekanan yang datang dari fiskus, agen seringkali harus memikirkan cara dengan maksud menyeimbangkan kepentingan fiskus dan prinsipal dengan cara dengan maksud menyeimbangkan kepentingan fiskus dan prinsipal dengan cara menjaga kesepakatan yang terjadi mengenai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain itu, konflik juga dapat membuat agen menggunakan strategi dengan maksud menghindari pajak yang berlebihan.

Strategi ini tidak hanya bertujuan dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetapi juga membuat agen dapat mendapatkan manfaat secara finansial dari pendari penghindaran pajak. Akhirnya, konflik antara prinsipal dan fiskus ini akan mempunyai dampak yang relevan bagi perusahaan dan dapat memperani laba yang diperoleh. Oleh karena itu, agen harus memberikan pertimbangan yang matang dalam hal-hal seperti tingkat pajak yang diperlukan dengan maksud mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan oleh prinsipal.

1. Pajak
   1. Definisi Pajak

Mardiasmo (2019:3) menyatakan bahwa pajak adalah salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah dengan maksud mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna dengan maksud kepentingan bersama. Hasil pajak merupakan sumber penerimaan yang bersifat terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal oleh pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku perpajakan Edisi Revisi (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara merujuk pada undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan dengan maksud membayar pengeluaran umum.

* 1. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA. Fungsi Pajak antara lain, yaitu:

* + - 1. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dengan maksud membiayai pengeluaran negara.
      2. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu sebagai alat dengan maksud mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
      3. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak pemerintah mempunyai dana dengan maksud menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
      4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan dengan maksud membiayai semua kepentingan umum, termasuk dengan maksud membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan nasional.
  1. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA. Ada beberapa asas pemungutan pajak di indonesia yaitu:

1. Asas Domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Harus Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dan asas ini berlaku dengan maksud Harus Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggak Harus Pajak.
3. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran diartikan dengan bentuk wujud dari ikhlas, tulus dan tidak dipaksa dengan maksud melakukan atau mengutarakan sesuatu hal. Salah satu contohnya adalah harus pajak yang menjalankan keharusan dalam keikutsertaan perpajaknnya. Kesadaran mampu tumbuh jika seindividu harus pajak mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat menerima fungsi dari adanya sosialisasi perpajakan dan juga mempunyai pandangan baik pada kegunaan, manfaat dan kepastian hukum perpajakan. Kesadaran diri dalam harus pajak harus ada karena diperlukan, adanya kesadaran pasti tingkat keikutsertaan perpajakan tidak bisa terbentuk dengan sempurna dan kegunaan perpajakan tidak akan terealisasi dengan tepat baik sasaran maupun waktu penyalurannya (Atmaja & Sumarta, 2023) dalam (Dewi & Merkusiwati (2018).

1. *Self Assessment System*

*Sistem self assessment* merupakan salah satu metode pemungutan pajak di mana harus pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri keharusan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Sistem ini telah dipercayakan oleh otoritas pajak kepada harus pajak, sehingga peran serta aktif harus pajak sangat dibutuhkan. Harus pajak cenderung menunjukkan hubungan yang baik antara kesadaran dan keikutsertaan dalam keharusan pajaknya jika mereka mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan yakin akan keikutsertaannya. Hal ini menegaskan bahwa integritas harus pajak merupakan syarat penting dengan maksud pelaporan dan pembayaran pajak yang akurat(Dewi & Supadmi, 2014) dalam (Anjanni, 2019)

1. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara kerja pegawai yang bertugas melayani, membantu mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu harus pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas apabila pegawai bisa memberikan berbagai informasi yang terpercaya mengenai perpajakan seperti tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dalam harus pajak. Selain itu faktor penting dalam pelayanan yaitu sikap dari pegawai tersebut sepanjang melakukan pelayanan dalam harus pajak contohnya saat berinteraksi dengan tuturkata baik, sopan, ramah, sabar dengan hal itu dapat meningkatkan pelayanan dan keikutsertaan harus pajak (Nugrahani & Suryaningrum, 2023).

1. Penerapan *E-Billing*

*E-Billing* adalah layanan pajak dengan tujuan dengan maksud memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara online ke Direktorat Jendral Pajak (DJP). Indikator pengimplementasian sistem *e-billing* menurut (Susanti, 2021) terdiri dari kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak, keakuratan dalam perhitungan dan pengisian Surat Setoran Pajak. Dengan adanya sistem *e-billing* berharap hal ini dapat memudahkan harus pajak dalam membayar pajaknya, yang akan meningkatkan keikutsertaan pajak (Suhadi, 2017) dalam (Susanti, 2021).

1. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan keikutsertaan dalam ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan sanksi pajak adalah dengan maksud mencegah harus pajak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Sandra & Chandra (2021), tujuan pengimplementasian sanksi pajak oleh pemerintah adalah dengan maksud memotivasi harus pajak agar memenuhi keharusan perpajakannya dan menciptakan rasa jera bagi harus pajak yang tidak patuh. Ketika harus pajak yakin akan mengalami kerugian yang lebih besar akibat sanksi pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam keharusan perpajakannya. Dengan demikian, harus pajak cenderung lebih patuh dalam keharusan perpajakannya daripada menanggung beban denda yang besar karena sanksi pajak yang lebih berat (Wahyuni, Kusuma, 2021).

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian Purnamasari dan Wibowo (2021) yang meneliti variabel-variabel yang memperani keikutsertaan harus pajak individu personal. Variabel pengimplementasian sistem e-registrasi, e-filing, e-billing, pengetahuan perpajakan, kesadaran harus pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal, berdasarkan hasil penelitian mereka yang menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak SPSS.

Atmaja & Sumarta (2023) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memperani keikutsertaan harus pajak individu personal. Pada penelitiannya menunjukan peran baik dalam keikutsertaan harus pajak ditunjukan oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus dan persepsi sikap tidak berperan dalam keikutsertaan harus pajak.

Hidayati & Muniroh (2023) melakukan penelitian mengenai peran kesadaran harus pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi e-filling dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kesadaran harus pajak dan penggunaan aplikasi *e-filling* berperan baik dan relevan dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. Sementara itu, sanksi perpajakan berperan baik dan tidak relevan dalam keikutsertaan harus pajak individu personal.

Wahyuni, Kusuma (2021) melakukan penelitian mengenai peran kesadaran harus pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pengimplementasian *e-billing* dalam keikutsertaan membayar pajak harus pajak individu personal. Hasil penelitiannya menunjukan variabel yang mempunyai peran baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal ditunjukan oleh variabel kesadaran harus pajak, sanksi pajak, dan pengimplementasian *e-billing*. Sedangkan variabel yang berperan negatif dalam keikutsertaan harus pajak individu personal ditunjukan oleh variabel sosialisasi pajak.

Nugrahani & Suryaningrum (2023) melakukan penelitian mengenai peran kesadaran harus pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dalam keikutsertaan harus pajak. Hasil penelitiannya menunjukan variabel kesadaran harus pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak. Sementara itu variabel pengetahuan perpajakan tidak berperan dalam keikutsertaan harus pajak.

Yuliani & Fidiana (2021) melakukan penelitian mengenai peran modernisasi sistem administrasi, pelayanan fiskus dan sanksi dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. Hasil penelitiannya menunjukan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (meliputi *e-registration, e-billing, e-filling*), pelayanan fiskus, sanksi perpajakan berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal.

Gusti & Muid (2023) melakukan penelitian mengenai peran pelaksanaan *self assessment system* dan pengimplementasian *tax electronic system* (TES) dalam keikutsertaan harus pajak dalam negeri. Hasil penelitiannya menunjukan variabel *self assessment system* dan pengimplementasian *tax electronik* Sistem ini memengaruhi keikutsertaan harus pajak individu dengan cara yang baik.

Sukiyaningsih (2020) melakukan penelitian mengenai *study of e-system implementation and self assessment system implementation of taxpayer compliance*. Hasil penelitiannya menunjukan variabel *electronic filing, billing, and registration, dan self assessment system* mempunyai peran baik dalam keikutsertaan harus pajak.

Nilla & Widyawati (2021) Penelitian ini mengkaji bagaimana keikutsertaan harus pajak diperani oleh penggunaan e-billing, kesadaran pajak, dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesadaran pajak dan pengimplementasian e-billing berdampak baik dalam keikutsertaan harus pajak. Di sisi lain, keikutsertaan harus pajak tidak terlalu diperani oleh variabel kesadaran harus pajak.

Setiadi & Rosyadi (2022) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memperani keikutsertaan harus pajak individu personal di DKI Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukan variabel pengetahuan perpajakan mempunyai peran dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. Sementara itu, variabel pengimplementasian sistem *e-filling*, pengimplementasian sistem *e-billing*, sosialisasi peraturan sistem dan kebijakan, pelayanan kantor pajak dan sanksi perpajakan tidak mempunyai peran dalam keikutsertaan harus pajak individu personal.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peneliti dan Tahun | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
| 1. | Sukiyaningsih (2020) | *Study of e-system implementation and self assessment system* *implementation of taxpayer compliance*. | Hasil penelitiannya menunjukan variabel *e-registration, e-billing, e-filling,* dan *self assessment system* mempunyai peran baik dalam keikutsertaan harus pajak. |
| 2. | Purnamasari & Wibowo (2021) | Faktor-faktor yang memperani keikutsertaan harus pajak individu personal.  . | Menunjukan variabel pengimplementasian *system e-registration, e-filling, e-billing*, pengetahuan perpajakan, Sanksi pajak, pengetahuan harus pajak, dan standar layanan otoritas pajak. |
| 3. | Setiadi & Rosyadi (2021) | Faktor-faktor yang memperani keikutsertaan harus pajak individu personal di DKI Jakarta. | Berdasarkan hasil penelitian, keikutsertaan harus pajak individu personal sangat diperani oleh variabel pengetahuan perpajakan. Di sisi lain, keikutsertaan harus pajak individu personal tidak diperani secara relevan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pengimplementasian sistem e-filing dan e-billing, distribusi sistem dan kebijakan regulasi, layanan kantor pajak, dan sanksi perpajakan. |
| 4. | Putra, Kusuma, & Sudiartana (2021) | Peran kesadaran harus pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan pengimplementasian *e-billing* dalam keikutsertaan membayar pajak harus pajak individu personal. | Hasil penelitiannya menunjukan variabel yang mempunyai peran baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal ditunjukan oleh variabel kesadaran harus pajak, sanksi pajak, dan pengimplementasian *e-billing*. Sedangkan variabel yang berperan negatif dalam keikutsertaan harus pajak individu personal ditunjukan oleh variabel sosialisasi pajak. |
| 5. | Nilla& Widyawati (2021) | Peran pengimplementasian *e-billing*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak dalam keikutsertaan harus pajak. | Hasil penelitiannya menunjukan variabel pengimplementasian *e-billing* dan pengetahuan perpajakan mempunyai peran baik dalam keikutsertaan harus pajak. Sedangkan variabel kesadaran harus pajak tidak berperan dalam keikutsertaan harus pajak. |
| 6. | Yuliani & Fidiana (2021) | Peran modernisasi sistem administrasi, pelayanan fiskus dan sanksi dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. | Hasil penelitiannya menunjukan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (meliputi *e-registration, e-billing, e-filling*), pelayanan fiskus, sanksi perpajakan berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. |
| 7. | Gusti & Muid (2023) | Peran pelaksanaan *self assessment system* dan pengimplementasian *tax electronic system* (TES) dalam keikutsertaan harus pajak dalam negeri. | Hasil penelitiannya menunjukan variabel *self assessment system* dan pengimplementasian tax electronik system berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. |
| 8. | Hidayati& Muniroh (2023) | Peran kesadaran harus pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi *e-filling* dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. | Hasil penelitiannya menunjukan bahwa kesadaran harus pajak dan penggunaan aplikasi *e-filling* berperan baik dan relevan dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. Sementara itu, sanksi perpajakan berperan baik dan tidak relevan dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. |
| 9. | Nugrahani& Suryaningsum (2023) | Peran kesadaran harus pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dalam keikutsertaan harus pajak. | Hasil penelitiannya menunjukan variabel kesadaran harus pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak. Sementara itu variabel pengetahuan perpajakan tidak berperan dalam keikutsertaan harus pajak. |
| 10. | Atmaja& Sumarta (2023) | Faktor-faktor yang memperani keikutsertaan harus pajak individu personal. | Pada penelitiannya menunjukan peran baik dalam keikutsertaan harus pajak ditunjukan oleh variabel sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel kualitas pelayanan fiskus dan persepsi sikap tidak berperan dalam keikutsertaan harus pajak. |

1. Kerangka Pemikiran Konseptual
2. **Peran Kesadaran Harus Pajak Dalam Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal**

Kesadaran harus pajak adalah kondisi dimana harus pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika tingkat kesadaran harus pajak tinggi, maka akan tinggi pula tingkat keikutsertaan harus pajak dalam melaksanakan keharusan perpajakannya. Kesadaran harus pajak sangat diperlukan dengan maksud meningkatkan keikutsertaan harus pajak Purnamasari & Wibowo (2021), dalam penelitiannya menyatakan kesadaran harus pajak berperan relevan dalam keikutsertaan harus pajak individu personal. Joy *et al*. (2022) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran pajak berperan relevan dalam keikutsertaan harus pajak. Nilla & Widyawati (2021) dalam penelitiannya menyatakan kesadaran harus pajak berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak.

**H1 : Diduga kesadaran harus pajak berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.**

1. **Peran *Self Assessment System* Dalam Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal**

Harus pajak bertanggung jawab dengan maksud mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri keharusan pajaknya. Hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, pemahaman harus pajak tentang keharusannya dengan maksud membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya sangat penting dengan maksud memastikan ketepatan pembayaran pajak. Kesadaran harus pajak merupakan komponen penting dari sistem perpajakan self-assessment yang harus diperhatikan dengan maksud meningkatkan pengimplementasian sistem dan, pada akhirnya, keikutsertaan harus pajak. Pemahaman harus pajak dalam keharusan pajaknya sangat penting, karena menumbuhkan pengetahuan tentang keharusan membayar pajak merupakan hal yang sulit bagi sebagian masyarakat, karena ada individu yang cenderung menghindari keharusan pajaknya (Sukiyaningsih, 2020).

**H2 : Diduga *self assessment system* berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.**

1. **Peran Pelayanan Fiskus Dalam Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal**

Pelayanan fiskus mempunyai pengertian sebagai cara petugas pajak dalam melayani, membantu mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseindividu dalam hal ini adalah harus pajak Nugrahani & Suryaningrum (2023). Petugas pajak yang berkualitas apabila petugas dapat memberikan segala informasi yang akurat mengenai perpajakan seperti tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak kepada harus pajak. Selain itu, faktor penting dalam pelayanan yaitu sikap fiskus selama melakukan pelayanan kepada harus pajak seperti dapat berinteraksi dengan baik, ramah, dan sabar diharapkan dapat meningkatkan keikutsertaan harus pajak.

**H3 : Diduga Pelayanan fiskus berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal.**

1. **Peran Pengimplementasian *E-Billing* Dalam Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal**

Pengimplementasian *E-Billing* merupakan upaya uang digunakan dengan maksud menunjang kelancaran dan kemudahan perpajakan melalui teknologi internet. Kebanyakan harus pajak beralasan sibuk sehingga tidak bisa melaporkan keharusan perpajakannya. Seiring berkembangnya jaman khusunya di bidang teknologi, pengimplementasian *E-Billing* lebih memudahkan harus pajak dalam melaksanakan keharusannya. Pembuatan NPWP secara *online*, pembayaran pajak secara *online*, pembuatan e-SPT dengan mudah, pembuatan Faktur Pajak secara elektronik dan pelaporan SPT online dengan menggunakan *e-filling*. Adanya sistem perpajakan modern ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pembayaran pajak yang cenderung akan meningkatkan keikutsertaan harus pajak. Nurmalitasari (2018), dalam penelitiannya menyatakan sistem administrasi perpajakan modern *e-billing* berperan baik dalam keikutsertaan pembayaran perpajakan. Susanti (2021) dalam penelitiannya menyatakan *e-billing* berperan baik dalam keikutsertaan pembayaran perpajakan.

**H4: Diduga pengimplementasian *e-billing* berperan baik dalam keikutsertaan membayar pajak oleh harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.**

**5. Peran Sanksi Perpajakn Dalam Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar harus pajak tidak melanggar norma perpajakan Yuliani & Fidiana (2021). Harus pajak akan memenuhi keharusan perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi sanksi pajak yang memberatkan harus pajak akan membuat harus pajak memilih dengan maksud melaksanakan keharusan perpajakannya daripada harus membayar sanksi yang tinggi sehingga akan meningkatkan keikutsertaan harus pajak Sandra & Chandra (2021), dalam penelitiannya menyatakan sanksi pajak berperan relevan dalam keikutsertaan harus pajak. Varotsis & Katerelos (2020), dalam penelitiannya menyatakan sanksi perpajakan berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak.

**H5 : Diduga sanksi pajak berperan baik dalam keikutsertaan membayar pajak oleh harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.**

Merujuk pada masalah yang telah dijabarkan, evaluasi dari penelitian terdahulu serta studi teoritis yang sudah dijelaskan, maka kerangka pemikiran yang akan menunjukan hubungan antar variabel digambarkan diantaranya:

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

H1

*Self Assessment System* (X2)

H2

H3

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Y)

Pelayanan Fiskus (X3)

Pengimplementasian *E-Billing* (X4)

H4

H5

Sanksi Perpajakan (X5)

**Gambar 1. 1**

**Kerangka Pemikiran Konseptual**

1. Hipotesis

Sebuah penelitian akan dilakukan jika adanya sebuah permasalahan yang tidak bisa secara cepat disimpulkan dan membutuhkan sebuah ketelitian juga kesabaran Sandra & Chandra (2021). Menyusun hipotesis mempunyai peran penting sebagai wujud tingkat pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti. Berikut ini hasil hipotesis sementara yang dapat diuraikan merujuk pada pada permasalahan yang sama atas penelitian yang sudah dihasilkan terdahulu, yaitu :

H1: Diduga kesadaran harus pajak berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.

H2: Diduga *self assessment system* berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.

H3: Diduga Pelayanan fiskus berperan baik dalam keikutsertaan harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal.

H4: Diduga pengimplementasian *e-billing* berperan baik dalam keikutsertaan membayar pajak oleh harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.

H5: Diduga sanksi pajak berperan baik dalam keikutsertaan membayar pajak oleh harus pajak individu personal di KPP Pratama Kota Tegal.

H6: Diduga adanya perbedaan preferensi kesadaran harus pajak, selft assessement system, pelayanan fiskus, pengimplementasian e-billing, sanksi perpajakan, dan kepatuha harus pajak individu personal pada harus pajak individu personal laki-laki dan perempuan.

H7: Diduga adanya perbedaan preferensi kesadaran harus pajak, selft assessement system, pelayanan fiskus, pengimplementasian e-billing, sanksi perpajakan, dan kepatuha harus pajak individu personal pada harus pajak individu personal usia < 40 tahun dan > 40 tahun.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif kuantitatif sebagai metode investigasinya. Survei dan penyebaran kuesioner merupakan bagian dari proses pengumpulan data. Data primer merupakan data yang telah dikumpulkan dan harus diolah. Data numerik dan analisis statistik yang mencakup komponen penelitian kuantitatif merupakan fitur utama. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2017), peneliti harus melakukan pengujian hipotesis, melihat hubungan sebab akibat, dan membuat asumsi awal dengan maksud penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi korelasional yang berarti penelitian ini melihat hubungan pada tiap variabel.

1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dengan maksud dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono, (2017:13). Proses pertama dengan maksud melakukan penelitian ini adalah penentuan populasi. Fokus penelitian ini adalah 171.767 harus pajak individu personal yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal selama lima tahun terakhir.

1. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi menurut Sugiyono (2017:18). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan menggunakan rumus slovin dengan beberapa kriteria dalam penentuan sampelnya.

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : *Error tolerance*

n : 171.767/(1+171.767 (0,10)²

: 100 sampel

Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 dimana data akan diambil dari beberapa kecamatan yang ada di Tegal. Hal ini dilakukan agar sampel yang digunakan pada penelitian ini dapat mewakili seluruh harus pajak yang ada di Tegal. Pengambilan sampel ditentukan merujuk pada kriteria harus pajak yang telah mempunyai NPWP.

1. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
2. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual adalah kerangka kerja yang membahas kesulitan terkait variabel dan bertindak sebagai panduan bagi peneliti, sehingga memudahkan mereka dengan maksud mengoperasionalkan temuan mereka di lapangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tercantum di bawah ini dengan maksud meningkatkan pemahaman dan interpretasi berbagai gagasan yang termasuk dalam penyelidikan ini:

* 1. Variabel terikat *(Dependent)*

Variabel terikat menurut Sugiyono (2018) merupakan variabel yang diperani atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. *Variable dependent* dalam penelitian ini adalah Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal.

Merujuk pada variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan ke dalam masing-masing indikator yang merupakan ciri-ciri dari variabel tersebut dengan menggunakan skala interval..

* 1. Variabel bebas *(Independent)*.

Menurut Sugiyono (2018) variabel bebas (*independent*) merupakan variabel yang memperani atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). *Variable independen*t (bebas) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran harus pajak, *self assessement system*, pelayanan fiskus, pengimplementasian *e-billing*, dan sanksi perpajakan.

1. Operasional Variabel

**Tabel 3.1**

**Operasional Variabel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Dimensi | Indikator | Skala | Sumber |
| Kesadaran Harus Pajak (X1) | Pengetahuan Perpajakan | a.Pajak adalah iuran rakyat dengan maksud dana pembangunan.  b.Pajak adalah iuran rakyat dengan maksud dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.  c.Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.  d.Anda sudah merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan dengan maksud pembangunan. | Ordinal | (Atmaja & Sumarta, 2023) |
| *Self assessement system* (X2) | Kemandirian Harus Pajak | a.Meregistrasikan diri di kantor pelayanan pajak (KPP).  b.Menghitung dan membayar pajak secara mandiri.  c.Melaporkan pajak secara mandiri melalui kantor pajak. | Ordinal | (Gusti & Muid, 2023) |
| Peelayanan Fiskus (X3) | Kenyamanan Bagi Harus Pajak | a.Ketika ada kesalahan dalam penyampaian SPT, fiskus tidak langsung menolak SPT, namun melakukan bimbingan ke WP.  b.Fiskus (Petugas Pajak) sebaiknya melakukan sistem jemput bole ke WP bila ada WP yang belum melaporkan SPT nya setelah lewat 1 tahun, sebelum mengirimkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).  c.Accounts Representative (AR) selalu updated peraturan baru by email ke WP.  d.Ada back-up AR yang siap menggantikan AR yang berhalangan hadir. | Ordinal | (Setiadi & Rosyadi, 2022) |
| Pengimplementasian *E-Billing* (X4) | Ketersediaan Yang Luas Dan Fleksibel | a.Penyampaian SPT bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.  b.Biaya pelaporan SPT lebih murah.  c.Kemudahan pengisian SPT  d.Meminimalisir penggunaan kertas. | Ordinal | (Atmaja & Sumarta, 2023) |
| Sanksi Perpajakan (X5) | Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana | a.Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak PPh harus dikenai sanksi 2%.  b.Sanksi Administrasi berupa denda 100.000 saat terlambat melaporkan SPT.  c.Tingkat pengimplementasian sanksi  d.Penghapusan sanksi meningkatkan keikutsertaan harus pajak.  e.Tidak melaporkan SPT dengan sengaja akan dipidana paling singkat 6 bulan. | Ordinal | (Setiadi & Rosyadi, 2022) |
| Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal (Y) | Keikutsertaan Formal dan Material | a.WP mendaftarkan NPWP merujuk pada keinginan personal.  b.Harus pajak harus mempunyai NPWP.  c.WP tahu batas waktu dengan maksud melaporkan pajak.  d.WP dapat menghitung pajak dengan benar.  e.Pengimplementasian sanksi yang tegas bisa membuat WP dengan maksud berlaku jujur. | Ordinal | (Gusti & Muid, 2023) |

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang dihasilkan berupa data primer yang diambil melaluli jawaban informan. Kuisioner yang digunakan dicancang dengan maksud memahami dan memecahkan masalah penelitian yang dihadapi. Penelitian yang menggunakan data primer ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket kepada harus pajak individu personal (Sugiyono, 2017).

1. Tes Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian

### Tes Validitas

Tes validitas digunakan dengan maksud mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu dengan maksud mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada penelitian ini menggunakan Tes Korelasi Bivariate Pearson, yaitu menganalisis dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Kriteria pengujian adal8ah jika r hitung > r tabel (tes 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-item pertanyaan berkorelasi relevan dalam skor total, maka pertanyaan dinyatakan valid Ghozali (2018).

### Tes Reliabilitas

Metode dengan maksud mengevaluasi kuesioner yang berfungsi sebagai indikasi variabel atau konstruk adalah pengujian reliabilitas. Ketika informan kuesioner memberikan jawaban yang konsisten dan stabil sepanjang waktu, kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan. Sesuai pernyataan Sugiyono (2017), penelitian yang dianggap bereputasi menunjukkan "adanya data yang serupa di berbagai periode waktu." Pendekatan Konsistensi Internal, yang menggunakan kriteria One Shot yang mengukur hanya sekali dan membandingkan temuan dengan jawaban pertanyaan berikutnya digunakan dengan maksud melakukan pengujian reliabilitas. Cronbach's Alpha, tes statistik dengan ambang batas lebih besar dari 0,6, adalah salah satu cara program Statistical Product and Service Solution (SPSS) mengukur ketergantungan. Ketika koefisien alpha lebih tinggi dari 0,60, dapat dikatakan bahwa alat risetnya valid.

1. Metode Analisis Data

Tujuan penelitian ini adalah dengan maksud mengtes hipotesis dengan menganalisis secara statistik peran faktor-faktor independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 22, analisis regresi linier berganda, dan pengujian asumsi tradisional merupakan teknik analisis data yang digunakan.

* + - 1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018), analisis deskriptif menawarkan ringkasan data yang dianalisis menggunakan metrik seperti mean, paling banyak, paling sedikit, dan deviasi standar, sum, range, skewness dan kurtoris. Bagi variabel-variabel yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini juga akan dijelaskan lebih spesifik. Analisis deskriptif ini juga menyajikan data dengan ukuran numerik yang penting bagi data yang ada pada sampel.

* + - 1. Uji Asumsi Klasik

Tes asumsi klasik dipakai dengan maksud menentukan apakah data peneliti berkualitas baik atau tidak. Perihal ini bertujuan guna menganalisis serta meskor apakah model regresi yang dipakai pada penelitian ini layak dengan tidak menyimpang dari asumsi klasik Ghozali (2018). Asumsi standar yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari banyak pengujian, seperti tes heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas.

1. Uji Normalitas

Uji ini menentukan apakah variabel residual atau gangguan dalam model regresi mempunyai distribusi normal. Ada dua cara dengan maksud mengtes kenormalan: secara statistik, menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov, dan secara grafis, dengan Plot Probabilitas, seperti yang dijelaskan oleh Ghozali (2018). Data dikatakan terdistribusi secara teratur jika skor relevansi (Sig.) dari tes Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05; di sisi lain, jika skor Sig. kurang dari 0,05, data tidak mengikuti distribusi normal, seperti yang dinyatakan oleh Ghozali (2018). Distribusi titik-titik data sepanjang sumbu diagonal grafik atau histogram residual, yang menjadi dasar dengan maksud pengambilan keputusan, dapat digunakan dengan maksud meskor tes Plot Probabilitas:

1. Data yang tersebar di sekitar garis diagonal dan selaras dengan arahnya menunjukkan bahwa model regresi memenuhi syarat kenormalan.
2. Jika data tersebar luas di luar wilayah dan tidak mengikuti orientasi diagonal, model regresi tidak memenuhi asumsi kenormalan.
3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas adalah koneksi linear antara variabel bebas dalam regresi berganda. Tidak adanya korelasi atau multikolinearitas antar variabel independen merupakan tanda model regresi yang sehat. Ghozali (2018) mengemukakan bahwa variabel independen tersebut tidak ortogonal jika menunjukkan korelasi. Dengan maksud mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi, perlu dilakukan pemeriksaan skor toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika skor toleransi kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10, maka terindikasi multikolinearitas; jika skor toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terindikasi multikolinearitas.

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah residual dari berbagai data dalam model regresi menunjukkan ketidaksetaraan varians. Menurut Ghozali (2018), varians residual disebut homoskedastisitas jika konstan di seluruh pengamatan; jika berfluktuasi, disebut heteroskedastisitas. Dalam diagram sebar, di mana sumbu Y menunjukkan skor prediksi dan sumbu X menunjukkan residual, seseindividu dapat mencari pola tertentu antara skor prediksi variabel dependen dan residual dengan maksud menentukan apakah heteroskedastisitas hadir dalam model regresi.

* + - 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, karena penelitian ini mencakup lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda berupaya dengan maksud mengetahui peran variabel independen (X) dalam variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah peran Kesadaran Harus Pajak (X1), Self Assessment System (X2), Pelayanan Fiskus (X3), Pengimplementasian E-Billing (X4), Sanksi Perpajakan (X5), Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal (Y). Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y = α + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + β4X4 + β5X5 + e

Keterangan:

Y = Keikutsertaan Harus Pajak Individu Personal

α = Konstanta

β1... β2 = Skor beta dari masing-masing variabel independen

X₁ = Kesadaran Harus Pajak

X₂ = *Self Assessment System*

X3 = Pelayanan Fiskus

X4 = Pengimplementasian *E-Billing*

X5  = Sanksi Perpajakan

e = *Error*

* + - 1. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017a) tes hipotesis adalah pernyataan yang menunjukan ditemukan maupun tidaknya keterkaitan antar variabel bebas dengan variabel terikat.

* 1. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang menentukan apakah semua variabel independen secara simultan berperan relevan dalam variabel dependen Ghozali (2018). Jika skor relevansi F > 0,05 maka hipotesis ditolak, dan jika skor relevansi F < 0,05 maka hipotesis diterima, menyiratkan bahwa semua variabel independen secara simultan mempunyai peran dalam variabel dependen.

Selain itu dapat juga dengan melihat skor pada kolom F dengan cara membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat kepercayaan yang ditentukan adalah 5 %. Jika Fhitung > Ftabel, maka variabel independen berperan secara simultan dan model regresi layak digunakan dengan maksud penelitian (Ghozali, 2018).

* 1. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2018) Intinya, tes-t menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan dampak pada variabel dependen. Ini adalah proses dengan maksud melakukan tes-t:

1. Dianggap relevan jika skor relevansinya kurang dari 0,05. Hipotesis alternatif (Ha) harus diterima jika koefisien regresi diperiksa terlebih dahulu dan arahnya sesuai dengan hipotesis.
2. Skor yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data tersebut tidak relevan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga menolak hipotesis alternatif (Ha).
   * + 1. Analisis Koefisien Determinasi (Tes R2)

Dengan maksud menentukan seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen, digunakan tes koefisien determinasi. Tingkat peran variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan oleh skor koefisien determinasi, yang dinyatakan dalam R kuadrat (R²). Rentang koefisien determinasi adalah 0 hingga 1. Skor R2 yang rendah menunjukkan keterbatasan kemampuan variabel independen dengan maksud menjelaskan varians dalam variabel dependen. Di sisi lain, ketika skor R2 mendekati satu, itu berarti bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan dengan maksud mengenali perbedaan dalam variabel dependen dapat ditemukan dalam variabel independen (Ghozali, 2018).